

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Pengawasan tidak hanya berlaku pada skala manajemen saja, melainkan organisasi setingkat Negara juga membutuhkan pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut perlu adanya lembaga-lembaga pengawas. Indonesia sendiri memiliki dua jenis lembaga pengawas yaitu lembaga pengawas eksternal dan lembaga pengawas internal. Lembaga pengawas internal biasa disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP terdiri atas Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi; Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP sebagai auditor internal pada pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar yaitu menciptakan proses tata kelola

pemerintahan yang baik, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun kasus penanganan dugaan korupsi yang ada di wilayah Sumatera Selatan berjalan sangat lambat. Hasil audit yang lamban dikeluarkan tersebut mengakibatkan proses penyidikan yang dilakukan Polda Sumsel maupun Kejati sempat terhenti. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Indra Zuardi menilai kinerja BPK dan BPKP dalam menangani kasus korupsi di Sumsel perlu dipertanyakan (<http://sumsel.tribunnews.com/2015/06/29/>). Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kinerja auditor baik auditor BPKP maupun auditor BPK.

Menurut penulis kinerja auditor menjadi sangat penting demi terciptanya fungsi audit yang efektif dan optimal karena auditor yang selalu meningkatkan kinerjanya diyakini mampu menjadi auditor yang berkualitas dan mampu menghasilkan produk audit yang berkualitas tinggi. Kinerja auditor dipengaruhi berbagai faktor. Dari beberapa faktor, faktor integritas, independensi, pemahaman *good governance* dan efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi menjadi sesuatu yang dapat diperhitungkan.

Integritas diperlukan auditor agar dapat bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Kode Etik Akuntan Indonesia menyatakan bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi

dalam menguji semua keputusannya. Maka apabila seorang auditor memiliki integritas yang tinggi, pemeriksaan akan dilakukan secara jujur, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Keputusannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari bukti-bukti yang dikumpulkan. Dengan demikian jaminan atas keluaran yang diberikan dapat dipercaya oleh semua pihak yang berkepentingan. Keluaran yang memiliki mutu yang baik mencerminkan kinerja auditor yang baik. Namun hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pejabat Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2009 (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/6546-sekda-bekasi-didakwa-suap-auditor-bpk.html>).

Kejadian ini bermula ditemukan bukti uang sebesar Rp 372 juta yang akan digunakan oleh pejabat pemerintah kota Bekasi untuk menyuap dua auditor BPK Jawa Barat agar hasil Laporan Keuangan Penggunaan Dana (LKPD) mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Yang menjadi tersangka pada kasus ini adalah Tjandra Utama Effendi sebagai Sekda, Heri Lukmanto sebagai kepala Inspektorat Kota Bekasi, Heri Suparjan selaku Kabid Aset dan Kekayaan DPPKAD Kota Bekasi, Enang Hermawan dan Suharto keduanya auditor BPK. Penyuapan kedua auditor BPK tersebut dilaksanakan terhitung tanggal 10 Januari sampai 10 Juni 2010. Total uang suap senilai Rp 400 juta diberikan dalam dua tahap, masing-masing Rp 200 juta. Atas kasus ini dua auditor BPK Jawa Barat yang terbukti menerima suap tersebut di vonis empat tahun penjara oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Jakarta. Sementara itu, pejabat Pemkot Bekasi dijatuhi hukuman penjara tiga tahun. Dari kasus tersebut jelas terlihat kurangnya integritas yang dimiliki auditor BPK. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengharuskan anggotanya untuk tidak menerima hadiah atau *entertainment* yang dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Tindakan menerima suap merupakan salah satu indikasi bahwa mereka sebagai auditor pemerintah tidak bisa menjaga integritasnya. Kedua anggota BPK yang terlibat cenderung mementingkan keuntungan pribadi dibandingkan profesionalitasnya sebagai auditor. Padahal, integritas mengharuskan seorang anggota IAI untuk bersikap jujur dan berterus terang sehingga pelayanan dan kepercayaan publik tidak dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Ada beberapa penelitian yang telah meneliti pengaruh integritas terhadap kinerja auditor yang memiliki hasil berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Orchidia (2014) menyebutkan bahwa integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baisary (2013) dan Erina et. al (2012). Namun hal ini bertolak belakang dengan Wanadri & Astuti (2015) yang mengatakan bahwa integritas tidak mempengaruhi kinerja auditor.

Selain integritas, independensi juga berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam

pemeriksaan. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik. Berbeda dengan kasus yang terjadi di Jambi pada tahun 2009 yaitu kredit macet yang melibatkan akuntan publik (<http://regional.kompas.com/read/2010/05/18/21371744/Akuntan.Publik.Diduga.Terlibat>).

Kasus ini melibatkan perusahaan Raden Motor, pegawai BRI Jambi dan seorang akuntan publik Biasa Sitepu. Awal mulanya Raden Motor mengajukan permohonan pinjaman ke BRI Jambi sebesar Rp 52 miliar dalam beberapa tahun dengan maksud pengembangan usaha. Namun, penggunaan kredit tersebut oleh Raden Motor tidak sesuai dengan peruntukan, sebagaimana pengajuan pinjamannya kepada BRI. Dari itu di nilai ada penyimpangan, dan hingga jatuh tempo pada 14 April 2008 dana pinjaman kredit sekitar Rp 52 miliar itu tidak bisa dikembalikan oleh pihak Raden Motor. Dikatakan, adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pemberian kredit sehingga ditemukan kerugian negara senilai Rp 52 miliar. Adanya dugaan kuat telah terjadi kerja sama antara pegawai BRI Jambi dengan Raden Motor dilihat dari prosedur dan tahapan pengajuan yang disalahgunakan. Hal ini mengakibatkan pegawai BRI Jambi, Effendi Syam dan Pimpinan Raden Motor, Zein Muhammad ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi. Setelah diperiksa terungkaplah fakta bahwa ada empat kegiatan dalam laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk

dalam laporan keuangan yang seharusnya ada saat diajukan ke BRI Jambi. Laporan tersebut tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik Biasa Sitepu. Akuntan publik di anggap lalai dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan dan terbukti tidak jujur. Dari kasus tersebut terlihat kurangnya sikap independensi dalam pembuatan laporan keuangan. Pihak Biasa Sitepu tidak jujur dan berlaku curang dalam penyusunan laporan keuangan kliennya serta dikendalikan oleh Pimpinan Raden Motor demi dicairkannya pinjaman senilai Rp 52 miliar. Disisi lain, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara independensi dengan kinerja auditor yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007), Wati et. al (2010), Wulandari & Tjahjono (2011) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamilih (2014) yang menyebutkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Timbulnya kasus-kasus hukum menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan (Akriyanto, 2012). Terwujudnya *good governance* sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-manufaktur termasuk departemen pemerintahan itu sendiri. Prinsip dasar *good corporate governance* (GCG) adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*),

kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dengan pemahaman *good governance* yang lebih baik, pengetahuan akan hukum bisnis dan keahlian dalam menganalisis kondisi mendatang yang lebih baik akan menghasilkan opini yang sangat aktual dan terpercaya. Aturan yang mengacu prinsip *good governance* tidak hanya mencegah skandal tetapi juga bisa mendongkrak kinerja korporat (Samianto, 2004 dalam Akriyanto, 2012). Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dengan variable pemahaman *good governance* namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten. Trisnaningsih (2007), Yuskar & Devisia (2011), Ramadhan (2011), Hanna & Firnanti (2013), dan Pamilih (2014) yang menyimpulkan bahwa pemahaman *good governance* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Namun hal ini bertolak belakang dengan yang dikemukakan oleh Wati et. al (2010) yang menyebutkan bahwa pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman *good governance* seorang auditor dalam bekerja maka akan semakin mempengaruhi kinerja auditor tersebut.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan meluasnya dunia usaha, maka di zaman sekarang ini telah banyak diterapkan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi untuk mengelola data dan informasi. Pembukuan tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi telah menggunakan sistem yang telah terintegrasi. Auditor seringkali merasa kesulitan untuk melakukan pemeriksaan yang berskala besar dan menggunakan banyak data, yang dikhawatirkan akan berdampak pada terlambatnya penyelesaian laporan

audit. Laporan audit yang tertunda penyelesaiannya akan menyebabkan rendahnya produktivitas auditor sehingga kinerja auditor dinilai menjadi tidak baik dan secara tidak langsung akan memperkecil kemungkinan untuk menemukan penyimpangan penggunaan anggaran Negara. Keberhasilan teknologi sistem informasi pada suatu perusahaan dipengaruhi dari cara sistem itu dijalankan, tingkat kemudahan sistem itu bagi para pemakainya dan frekuensi penggunaan. Teknologi informasi yang dapat diakses dengan mudah memberikan arus informasi dan kebutuhan akan informasi yang cepat, andal, dan akurat sangat diperlukan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika perusahaan berani melakukan investasi di bidang teknologi informasi, dengan tujuan untuk dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja individual anggotanya. Efektivitas penggunaan atau pengimplementasian teknologi sistem informasi dalam suatu perusahaan dapat dilihat dari kemudahan pemakai dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data tersebut. Data dalam sistem informasi tersebut merupakan data yang terintegrasi dari seluruh unit perusahaan atau organisasi sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan tugas dalam perusahaan. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi dapat dikatakan berhasil jika dapat meningkatkan kinerja pegawai, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Septiningtyas (2010) yang menyebutkan bahwa efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor.

Oleh karena terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan masalah kinerja auditor serta perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Integritas, Independensi, Pemahaman *Good Governance* dan Efektivitas Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Auditor”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang melatarbelakangi kinerja auditor antara lain:

1. Kurangnya kinerja auditor dalam menangani kasus korupsi di Indonesia khususnya pada kasus korupsi di Sumatera Selatan.
2. Masih banyaknya kasus yang memperlihatkan kurangnya sikap integritas dan independensi auditor.
3. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kinerja auditor yang menunjukkan hasil yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kinerja auditor.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas serta untuk menghindari kesalahan dan menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, peneliti memiliki beberapa batasan terhadap penelitian ini, yaitu penelitian hanya dilakukan pada BPKP RI dan juga penelitian ini dibatasi pada integritas,

independensi, pemahaman *good governance* yang dimiliki auditor BPKP serta efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi yang digunakan.

D. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah integritas berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
5. Apakah integritas, independensi, pemahaman *good governance* dan efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja auditor?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bukti empiris tentang pengaruh integritas, independensi, pemahaman *good governance* dan efektivitas penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi terhadap kinerja auditor. Penelitian

ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan bagi penelitian selanjutnya khususnya tentang kinerja auditor.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para auditor khususnya auditor pemerintah dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPKP untuk memperhatikan kinerja auditornya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan kualitas aparat pemerintah terkait dengan profesionalisme pegawai dalam bekerja sehingga kinerja aparat pemerintah seperti yang diharapkan dapat tercapai dan melalui reformasi birokrasi, pada akhirnya *good governance* dapat terwujud.